BAB II

ASPEK HUKUM PIDANA TENTANG *RESTORATIVE JUSTICE* DI TINGKAT PENUNTUTAN, TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DAN PEMBAHARUAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Konsep *Restorative Justice*

Restorative justice adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, dengan fokus pada perbaikan kerugian yang ditimbulkan dan pengembalian keadaan semula. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara, berbeda dengan sistem retributif yang lebih menekankan pada hukuman terhadap pelaku (Zumhana, 2021, Bagian 4). Menurut Judith L. Herman, *restorative justice* bertujuan untuk memberikan pengakuan dan pemulihan martabat bagi korban, serta mendorong pertanggungjawaban pelaku secara sukarela. Herman menekankan pentingnya pendekatan yang mengutamakan kebutuhan korban dan komunitas dalam proses keadilan (Judith L. Herman, 2023, hlm. 243).

Restorative Justice dipahami bukan sekadar prosedur alternatif penyelesaian perkara di luar mekanisme formal, melainkan sebagai suatu paradigma transformasi sosial yang menempatkan konteks budaya dan struktur kekuasaan sebagai elemen sentral. González dan Schiff menekankan bahwa *restorative justice* lahir dari praktik komunal termasuk

nilai-nilai komunitarianisme dan tradisi masyarakat adat yang menekankan pemulihan relasi sosial melalui dialog yang partisipatif, reparasi atas kerugian (*reparation*), dan rekonsiliasi (*reconciliation*). Dalam kerangka pluralistik dan multikultural, proses ini juga diperkaya oleh gerakan hak-hak korban dan pendekatan feminis yang menyoroiti dinamika gender, serta kriminologi kritis yang mempertanyakan logika hukuman retributif. Dengan demikian, *restorative justice* berfungsi sebagai respons terhadap kegagalan sistem pemidanaan tradisional dalam menyediakan keamanan substantif, pemulihan psikososial korban, dan integrasi kembali pelaku ke dalam komunitas secara berkelanjutan (González & Schiff, 2023, hlm. 455).

Restorative justice akan berdampak positif terhadap sistem peradilan pidana yang sering kali tidak memuaskan korban karena kurangnya keadilan yang seimbang. Dalam pendekatan ini, penyelesaian masalah dilakukan melalui dialog dan musyawarah sebagai metode utama untuk mencapai kesepakatan antara korban dan pelaku. Korban yang merasa dirugikan perlu terlibat lebih aktif dalam proses penyelesaian perkara, karena dalam penegakan hukum formal, mereka cenderung bersikap pasif. Dalam *restorative justice*, korban tidak hanya menyerahkan kepentingannya kepada penyidik, penuntut umum, dan majelis hakim, tetapi juga berperan aktif dalam proses penyelesaian. *Restorative justice* menghasilkan kesepakatan yang berkelanjutan dan mengikat secara moral bagi kedua belah pihak, di mana korban mendapatkan keadilan yang lebih seimbang melalui kesepakatan dengan pelaku, yang akan menebus kesalahannya

dengan sanksi yang telah disepakati, seperti ganti rugi, terutama dalam kasus tindak pidana ujaran kebencian. Pendekatan *restorative justice* dianggap sebagai solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah, dan masyarakat yang belum memahami proses ini perlu diberikan pemahaman melalui penelitian dan informasi yang relevan.

Implementasi *restorative justice* dapat memulihkan kerugian yang dialami korban akibat tindak pidana ujaran kebencian, baik secara material maupun imaterial, sehingga proses penyelesaiannya menjadi lebih efektif dan memberikan keadilan yang lebih seimbang, terutama bagi korban. Adanya peraturan hukum dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa *restorative justice* dapat diterapkan secara lebih efektif, menciptakan perdamaian tanpa konflik yang berkepanjangan dan memberikan keadilan yang seimbang bagi korban yang menderita akibat tindakan pelaku. Penerapan *restorative justice* dalam menangani kasus tindak pidana ujaran kebencian dapat membantu mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan dan menghindari konflik yang berkepanjangan. Dengan mengedepankan perdamaian melalui lembaga musyawarah, penyelesaian ini jauh lebih efektif dibandingkan dengan proses peradilan pidana formal, sehingga dapat lebih memuaskan rasa keadilan bagi kedua belah pihak (Salamiah, 2024, hlm. 101).

Instrumen hukum acara pidana di Indonesia telah mengatur prosedur formal dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini menempatkan

proses pemulihan hubungan (*relationship restoration*) antara pelaku dan korban sebagai inti dari penyelesaian perkara, yang didasarkan pada *mutual agreement* antara kedua belah pihak. Dalam proses ini, korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan kerugian yang dialami, sementara pelaku diberikan peluang untuk menebus kesalahannya melalui mekanisme seperti *compensation, reconciliation, community service*, atau bentuk kesepakatan lainnya (Katim, 2022, hlm. 545).

Beberapa elemen kunci dari konsep *restorative justice* meliputi (Utami, 2023, hlm. 4) :

1. Pemulihan Hubungan (*Relationship Restoration*):

Restorative justice berfokus pada upaya memulihkan hubungan yang terganggu akibat tindak pidana dengan membangun kembali kepercayaan dan komunikasi yang konstruktif antara korban dan pelaku, bahkan melibatkan keluarga mereka sebagai bagian dari proses rekonsiliasi.

2. Penebusan Kesalahan (*Reparation of Harm*):

Pendekatan ini menempatkan tanggung jawab (*accountability*) pada pelaku untuk mengakui perbuatannya dan mengambil langkah konkret dalam memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, baik secara material maupun imaterial.

3. Upaya Perdamaian (*Peaceful Resolution*):

Proses ini membuka ruang dialog antara pelaku dan korban untuk mengungkapkan perasaan, memahami perspektif masing-

masing, dan mencari solusi yang dapat mengurangi dampak negatif perbuatan pelaku terhadap korban dan komunitas.

4. Penyelesaian di Luar Pengadilan (*Diversion from Formal Justice System*):

Restorative Justice menawarkan jalur alternatif di luar sistem peradilan pidana formal dengan menempatkan mediasi dan musyawarah sebagai alat utama dalam menyelesaikan konflik. Pendekatan ini dianggap lebih humanis karena mengedepankan pemulihan dibandingkan penghukuman.

5. Kesepakatan Bersama (*Mutual Agreement*):

Proses ini menuntut adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, di mana korban dan pelaku memiliki kendali dalam menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap adil. Kesepakatan ini menjadi landasan utama dalam mencapai keadilan yang partisipatif (*participatory justice*).

Konsep ini dipopulerkan oleh para pemikir seperti Howard Zehr dalam bukunya "*Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times*", yang menekankan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih inklusif, yang menempatkan korban sebagai pusat dalam proses keadilan. Howard Zehr menggambarkan *restorative justice* sebagai suatu pendekatan yang terdiri dari tiga pilar utama (Sawin dkk., 2023, hlm. 665) :

1. Kerugian dan Kebutuhan:

Restorative justice bertujuan untuk mengakui kerugian yang dialami dan kebutuhan yang timbul akibat suatu peristiwa. Pendekatan ini memfokuskan pada pemahaman terhadap apa yang terjadi, siapa yang dirugikan, dan apa yang diperlukan oleh pihak yang terdampak untuk memulihkan keadaan.

2. Kewajiban:

Dalam menangani kerugian, *restorative justice* kemudian berfokus pada kewajiban di antara para pemangku kepentingan (pihak yang terdampak dan yang bertanggung jawab). *Restorative justice* melihat tanggung jawab pelaku terhadap korban sebagai kewajiban utama, namun juga meluas pada kewajiban komunitas, lembaga, dan tatanan sosial yang mungkin telah menciptakan kondisi bagi terjadinya kerugian. Pendekatan ini menghindari penjelasan tunggal yang menyalahkan individu secara tunggal. Seluruh proses ini memerlukan dukungan yang memadai untuk memungkinkan pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut dengan cara yang adil dan wajar.

3. Keterlibatan:

Pilar keterlibatan menegaskan bahwa semua pihak yang terdampak langsung maupun tidak langsung harus dilibatkan secara bermakna dalam proses pemulihan. Bentuk keterlibatan dapat beragam, mulai

dari dialog tatap muka hingga media alternatif seperti pertukaran surat, konferensi video, atau penggunaan wakil. Dengan demikian, *restorative justice* membuka ruang partisipasi yang fleksibel dan inklusif, guna menciptakan proses penyembuhan dan rekonsiliasi yang lebih baik.

B. *Restorative Justice* di Indonesia

United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures atau yang lebih dikenal dengan *Tokyo Rules* merupakan standar minimum internasional mengenai penerapan sanksi pidana di luar bentuk pemenjaraan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi Majelis Umum Nomor 45/110 tahun 1990 tentang Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Untuk Tindakan Non-Pemenjaraan (*Tokyo Rules*) pada tanggal 14 Desember 1990. Ketentuan ini dirancang sebagai pedoman bagi negara-negara anggota dalam menerapkan bentuk pidana alternatif yang tidak melibatkan pemenjaraan, guna mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas hunian lembaga pemasyarakatan (*overcrowded*).

Tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk menyediakan alternatif pidana yang efektif dan proporsional terhadap pelaku tindak pidana. Melalui pendekatan individualisasi pidana (*individualized sentencing*), aparat penegak hukum diberikan ruang untuk mempertimbangkan sanksi yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan,

melainkan juga memperhatikan kondisi dan kepentingan pelaku. Dengan demikian, pelaku tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, menjaga hubungan sosial, serta melakukan aktivitas pekerjaan, selama proses pemidanaan berlangsung, sepanjang hal tersebut masih sesuai dengan derajat kesalahan dari perbuatan pidana yang dilakukan (Ulfah, 2021, hlm. 517).

Sanksi non-pemenjaraan atau *non-custodial measures* memiliki sejumlah manfaat penting yang menjadi pertimbangan dalam sistem pemidanaan modern, khususnya dalam upaya pembaruan hukum pidana antara lain :

1. Penerapan sanksi non-pemenjaraan memberikan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana yang tergolong ringan serta terhadap individu yang memerlukan intervensi medis, psikiatrik, atau bantuan sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan yang menekankan pada perlakuan berbeda terhadap pelaku berdasarkan karakteristik personal dan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan.
2. Pendekatan ini dinilai dapat menurunkan tingkat *residivisme* karena pelaku tidak mengalami tekanan psikologis dan stigma sosial yang sering kali timbul akibat pengalaman pemenjaraan.

3. Dari perspektif ekonomi, pemberlakuan sanksi non-pemenjaraan berpotensi mengurangi beban anggaran negara yang selama ini dialokasikan untuk operasionalisasi lembaga pemasyarakatan.
4. Tidak adanya pembatasan fisik terhadap kemerdekaan pelaku memberikan ruang bagi proses perubahan diri yang lebih alami dan manusiawi, karena pelaku tetap berada dalam lingkungan sosial yang normal tanpa terisolasi dari masyarakat.
5. Peluang reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku yang menjalani hukuman penjara, mengingat adanya kesinambungan interaksi sosial yang tetap terjaga.
6. Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pelaksanaan sanksi non-pemenjaraan mendorong terciptanya penerimaan publik dan kontrol sosial yang konstruktif. Hal ini sejalan dengan gagasan *restorative justice* yang mengedepankan peran komunitas dalam membangun pemulihan, bukan sekadar penghukuman.

Dalam praktiknya, penerapan pemidanaan non-pemenjaraan melalui *restorative justice* di Indonesia telah menunjukkan perkembangan positif. Sebagai alternatif atas sistem pemidanaan yang konvensional dan punitif, pendekatan *restorative justice* mulai mendapatkan perhatian di Indonesia. Pendekatan ini menekankan penyelesaian perkara pidana melalui mediasi antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat, dengan tujuan

memulihkan kerugian yang terjadi, bukan semata-mata menjatuhkan hukuman.

Implementasi *restorative justice* di Indonesia telah diakomodasi dalam sejumlah regulasi, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memperkenalkan konsep *diversi* sebagai mekanisme pengalihan perkara anak dari jalur formal peradilan ke penyelesaian di luar pengadilan.
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan pedoman kepada hakim dalam mengadili perkara pidana dengan prinsip *restorative justice*.
3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
4. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice* yang memberikan panduan bagi penyidik dalam menyelesaikan perkara secara restoratif.

Restorative justice dipandang sebagai solusi konkret dalam mengatasi masalah *overcrowded*, karena memungkinkan penyelesaian perkara di luar sistem pemsarakatan, sehingga mengurangi jumlah narapidana baru yang masuk Lapas atau Rutan.

Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 untuk memberikan pedoman yang lebih jelas bagi para hakim dalam mengadili perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*. Peraturan ini bertujuan untuk memulihkan korban tindak pidana, memulihkan hubungan antara terdakwa, korban, dan/atau masyarakat, menganjurkan pertanggungjawaban terdakwa, serta menghindarkan setiap orang, khususnya anak, dari perampasan kemerdekaan (PERMA, 2024).

Selain itu, *restorative justice* diatur pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 yang mengatur penanganan tindak pidana berdasarkan *restorative justice* dalam proses penyelidikan dan penyidikan, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mengatur Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 yang mengatur pedoman penerapan *Restorative Justice* di lingkungan peradilan umum. Meskipun telah diatur dalam berbagai regulasi, penerapan *restorative justice* di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

1. Kurangnya pemahaman dan pelatihan: Masih terdapat kekurangan dalam pemahaman dan pelatihan mengenai *restorative justice* di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat.

2. Persepsi publik: Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pendekatan *restorative justice* terlalu lunak dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.
3. Keterbatasan sumber daya: Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung juga menjadi hambatan dalam implementasi *restorative justice* secara efektif.

Dengan adanya regulasi terbaru dan peningkatan kesadaran akan pentingnya pendekatan *restorative justice*, prospek pengembangan *restorative justice* di Indonesia berdampak positif. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum, masyarakat, dan organisasi internasional seperti UNODC, diharapkan dapat memperkuat implementasi *restorative justice* di Indonesia (UNODC, 2024).

Dalam kapasitasnya sebagai penuntut umum, Kejaksaan memiliki wewenang untuk menentukan apakah suatu kasus dapat diselesaikan melalui jalur *restorative justice*. Peran Kejaksaan sangat penting dalam memastikan penerapan prinsip *restorative justice* dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, penuntut umum dalam menghentikan penuntutan dengan pendekatan *restorative justice* harus mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain:

- 1) kepentingan korban dan perlindungan terhadap kepentingan hukum lainnya;
- 2) upaya untuk menghindari stigma negatif;
- 3) pencegahan balas dendam;
- 4) respons serta keharmonisan dalam masyarakat; dan
- 5) prinsip kepatutan, kesusilaan, serta ketertiban umum.

Selain itu, penuntut umum juga perlu memperhatikan faktor-faktor lain dalam penghentian penuntutan, seperti:

- 1) subjek, objek, kategori, dan ancaman dari tindak pidana;
- 2) latar belakang yang mendorong terjadinya tindak pidana;
- 3) tingkat ketercelaan;
- 4) kerugian atau dampak yang ditimbulkan;
- 5) upaya pemulihan keadaan semula; dan
- 6) adanya kesepakatan damai antara korban dan tersangka.

Menurut Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, suatu perkara tindak pidana dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku dan proses penuntutannya dapat dihentikan melalui *restorative justice* jika memenuhi syarat tertentu, seperti tersangka merupakan pelanggar pertama kali, tindak pidana yang diancam dengan denda atau hukuman penjara tidak lebih dari 5 tahun, serta nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan tidak melebihi Rp2.500.000,- (dua

juta lima ratus ribu rupiah). Dalam praktiknya, semua lembaga penegak hukum di Indonesia, termasuk Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah mengadopsi prinsip *restorative justice* sebagai salah satu metode penyelesaian perkara pidana.

Pada tahun 2012, keempat lembaga ini menandatangani Nota Kesepakatan Bersama yang melibatkan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kesepakatan ini, yang memiliki nomor 131/KMS/SKB/X/2012, M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, KEP-06/E/EJP/10/2012, dan B/39/X/2012, ditandatangani pada 17 Oktober 2012, membahas pelaksanaan penyesuaian batasan tindak pidana ringan, jumlah denda, acara pemeriksaan cepat, serta penerapan *restorative justice*.

Nota Kesepakatan Bersama ini merupakan langkah penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Dengan mengadopsi prinsip *restorative justice*, keempat lembaga penegak hukum berkomitmen untuk menyelesaikan kasus pidana dengan pendekatan yang lebih memprioritaskan pemulihan dan reintegrasi pelaku serta korban ke dalam masyarakat. Tujuan dari Nota Kesepakatan Bersama ini mencakup pengaturan pelaksanaan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, pengaturan acara pemeriksaan cepat, serta penerapan *restorative justice*. Dengan demikian, Nota Kesepakatan Bersama ini

diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia, serta memberikan keadilan dan kepuasan bagi korban dan pelaku tindak pidana (Purba & Manullang, 2025, hlm. 83).

C. Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *hate speech*, *abusive speech*, atau *threatening speech*, merujuk pada ekspresi yang mengandung prasangka (*prejudice*) terhadap individu atau kelompok berdasarkan etnisitas, agama, orientasi seksual, atau identitas lainnya. Secara akademis, ujaran kebencian sering dikaitkan dengan konsep *bias-motivated speech*, yang menargetkan kelompok tertentu dengan tujuan merendahkan atau memicu kebencian kolektif. Menurut *Cambridge Dictionary*, *hate speech* didefinisikan sebagai pernyataan publik yang mengekspresikan kebencian atau mendorong tindakan kekerasan terhadap individu atau kelompok atas dasar ras, agama, dan karakteristik lainnya. Definisi ini sejalan dengan pandangan beberapa ahli yang menekankan bahwa ujaran kebencian tidak hanya mencerminkan sikap diskriminatif tetapi juga berpotensi memicu tindakan yang lebih berbahaya, seperti kekerasan berbasis kebencian (*hate-motivated violence*) (Saloom, 2021, hlm. 11).

Terdapat tiga perspektif utama dalam mendefinisikan ujaran kebencian (*hate speech*), yaitu dari aspek ilmu hukum, secara leksikal, dan berdasarkan pendekatan ilmu pengetahuan. Secara leksikal, definisi *hate speech* dapat ditemukan dalam berbagai kamus. Misalnya, *Cambridge*

Dictionary mendefinisikan *hate speech* sebagai "*public speech that expresses hate or encourages violence towards a person or group based on something such as race, religion, sex, or sexual orientation*" yang berarti ujaran publik yang mengekspresikan kebencian atau mendorong kekerasan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan faktor seperti ras, agama, jenis kelamin, atau orientasi seksual (Cambridge Dictionary, 2025).

Demikian pula, *Merriam Webster's Advanced Learner's English Dictionary* mendeskripsikan *hate speech* sebagai "*speech expressing hatred of a particular group of people*" yaitu ujaran yang mengungkapkan kebencian terhadap kelompok manusia tertentu (Merriam Webster, 2025). Sementara itu, *Collins English Dictionary* mendefinisikannya sebagai "*speech that attacks a person or group on the basis of race, religion, gender, or sexual orientation*" yang merujuk pada pernyataan yang menyerang individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau orientasi seksual (Collins Dictionary, 2025).

Tindakan kebencian, terutama kejahatan bermotif kebencian, berakar pada preferensi yang dimiliki setiap individu. Bagi sebagian orang, preferensi ini dapat berkembang menjadi keyakinan yang bersifat prasangka atau stigma. Proses prasangka terjadi ketika individu menggunakan *cognitive shortcuts* melalui stereotip, yaitu keyakinan berlebihan tentang suatu kelompok atau evaluasi terhadap objek, individu, atau kelompok tertentu. Keyakinan prasangka juga dapat muncul dari reaksi emosional negatif terhadap anggota kelompok yang menjadi sasaran. Pada akhirnya,

prasangka termanifestasi dalam bentuk perilaku diskriminatif yang ditujukan kepada individu lain berdasarkan keanggotaan kelompok mereka. Perilaku yang dimotivasi oleh kebencian dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis dan perilaku.

Salah satu faktor tersebut adalah *Social Dominance Orientation (SDO)*, yaitu kecenderungan individu untuk mendukung hierarki dan dominasi kelompok tertentu atas kelompok lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa SDO berperan dalam memprediksi sikap sosial dan politik yang mendukung prasangka dan diskriminasi. Selain itu, pola pikir dikotomis atau berpikir dalam kategori hitam putih tanpa mempertimbangkan nuansa, dapat menyebabkan individu lebih mudah mengadopsi stereotip dan prasangka terhadap kelompok lain (Dellagiacoma dkk., 2024, hlm. 4).

Ujaran kebencian merupakan tindak pidana yang semakin marak di era digital, melibatkan penyebaran kebencian berbasis suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) melalui media elektronik. Di Indonesia, pengaturan sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian diatur dalam beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (2), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 4 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 6 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Ujaran kebencian termasuk dalam kategori tindak pidana terhadap kehormatan, yang bertujuan melindungi kehormatan dan nama baik individu. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai

definisi kehormatan dan nama baik, keduanya diakui sebagai hak asasi manusia. Dalam konteks hukum, Surat Edaran Kapolri No SE/X/06/2015 menjelaskan bahwa ujaran kebencian mencakup penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, dan provokasi, baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 4 tentang Hak Asasi Manusia mengakui kebebasan berekspresi sebagai hak dasar, tetapi hak ini tidak bersifat mutlak dan harus menghormati hak orang lain serta ketertiban umum. Ujaran kebencian melanggar batasan ini, karena dapat merugikan kelompok tertentu dan mengganggu stabilitas sosial. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 Ayat (3), mengatur tentang pencemaran nama baik dan memberikan sanksi pidana bagi pelanggar, namun pasal ini juga menuai kontroversi terkait pembatasan kebebasan berpendapat.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perlindungan terhadap nama baik dan kehormatan adalah kepentingan umum yang harus dilindungi oleh hukum pidana. Meskipun demikian, penerapan undang-undang ini sering menghadapi tantangan, seperti interpretasi hukum yang bervariasi dan keterbatasan aparat penegak hukum dalam memahami konteks ujaran kebencian. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum dan peningkatan kapasitas penegak hukum untuk memastikan penerapan sanksi yang adil dan efektif. Dengan pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum,

penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pengaturan kebebasan berekspresi, diharapkan pengaturan sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian di Indonesia dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi (Hutagaol dkk., 2024, hlm. 642).

D. Sistem Pemidanaan di Indonesia

Dalam sistem hukum, penyelesaian perkara pada dasarnya dapat ditempuh melalui dua pendekatan, yaitu litigasi (melalui proses peradilan formal) dan non-litigasi (di luar mekanisme peradilan). Di Indonesia, pendekatan litigasi masih menjadi instrumen utama dalam penanganan perkara pidana. Mekanisme ini diharapkan mampu menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan melalui pemberian sanksi pidana, seperti pidana penjara atau kurungan. Namun, dalam implementasinya, penyelesaian perkara secara litigasi kerap menghadapi berbagai kendala. Model pemidanaan yang bersifat retributif cenderung menimbulkan persoalan seperti *overcrowded*, penumpukan perkara di pengadilan, rigiditas dalam prosedur hukum, serta kurangnya orientasi terhadap pemulihan korban dan keadilan substantif.

Dalam doktrin hukum, tujuan utama dari hukum adalah untuk mencapai keadilan, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch melalui teori tiga nilai dasar hukum, yakni keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*).

Radbruch menegaskan bahwa hukum tidak hanya dinilai dari formalitas normatifnya, tetapi juga dari sejauh mana ia mampu mewujudkan keadilan substantif dan memberikan kemanfaatan sosial. Dalam perspektif ini, setiap peraturan hukum harus dinilai dan diterapkan dengan mempertimbangkan integrasi ketiga nilai tersebut, agar tidak kehilangan makna sebagai instrumen yang mengatur dan melindungi hak-hak manusia dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak sekadar menjadi sarana pengendali perilaku, tetapi juga sebagai wahana untuk mewujudkan keadilan sosial yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat (Wala & Firmansyah, 2024, hlm. 5).

Strafrechtspolitik atau politik hukum pidana, sebagaimana dikemukakan oleh A. Mulder, merupakan suatu kebijakan dasar yang digunakan untuk menentukan arah dan ruang lingkup pembaharuan hukum pidana. Kebijakan ini mencakup tiga aspek utama, yaitu (Sriwidodo, 2023, hlm. 17) :

- a) penentuan sejauh mana ketentuan hukum pidana positif yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b) strategi yang dapat diterapkan guna mencegah terjadinya tindak pidana; dan
- c) pengaturan mengenai bagaimana proses penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilakukan secara efektif dan efisien.

Dalam kerangka pembaharuan hukum pidana, pendekatan yang digunakan tidak bersifat parsial melainkan menyeluruh, dengan melibatkan tiga komponen sistem hukum yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiganya harus berjalan secara sinergis agar pembaharuan dapat terlaksana secara optimal.

Terdapat berbagai teori pemidanaan, antara lain teori absolut/teori pembalasan (*Vergeldingstheorien*), teori relatif/teori tujuan (*doeltheorien*), teori gabungan (*Verenigingstheorien*), serta teori terpadu/integralistik. Uraian masing-masing teori adalah sebagai berikut (Rivanie dkk., 2022, hlm. 181):

a. Teori Absolut (*Vergeldingstheorien*)

Teori ini menyatakan bahwa hukuman dijatuhkan semata-mata sebagai konsekuensi atas tindak pidana yang telah dilakukan, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran. Pemidanaan berlandaskan pada tindakan pidana sebagai tolok ukur dalam penjatuhan hukuman. Menurut Barda Nawawi Arief dan Muladi, pemidanaan dalam konteks ini dipandang sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pidana yang terjadi.

b. Teori Relatif/Teori Tujuan (*Doeltheorien*)

Teori ini berpendapat bahwa pemidanaan dijatuhkan demi mencapai tujuan yang lebih besar atau kebaikan. Muladi

dan Barda Nawawi Arief menyampaikan bahwa hukuman tidak hanya dimaksudkan sebagai balasan atas tindak pidana, melainkan untuk memberikan manfaat kepada pelaku sebagai bagian dari tujuan yang lebih baik.

Teori ini terbagi menjadi dua jenis pencegahan: pencegahan umum, yang bertujuan menimbulkan efek jera melalui hukuman yang diberikan, dan pencegahan khusus, yang bertujuan mencegah pelaku melakukan tindak pidana kembali dengan menahan atau membatasi kebebasan mereka dalam jangka waktu tertentu. Beberapa ahli memberikan kontribusi pemikiran terhadap teori ini, termasuk Hegel, yang dikenal luas dalam filsafat dan juga oleh Soepomo di Indonesia.

c. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

Teori gabungan bertujuan mengombinasikan aspek pembalasan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum. Beberapa ahli, seperti Pompe, menyebut teori ini sebagai gabungan antara pembalasan sebagai akibat keadilan mutlak dan pertimbangan untuk kepentingan masyarakat. Ven Bergen, misalnya, menyatakan bahwa hukuman secara teori adalah bentuk pembalasan yang bersifat normatif, bertujuan menjaga martabat hukum dan kewibawaan pemerintah. Teori ini dianggap menggabungkan unsur pencegahan umum dan khusus secara bersamaan.

d. Teori Terpadu

Teori ini didasarkan pada pandangan negara integralistik, yang menggabungkan berbagai pendekatan pemidanaan ke dalam satu kerangka yang holistik. Dalam perkembangannya, sejumlah ahli turut menyumbangkan pemikiran terhadap konsep pemidanaan ini. Hegel menjadi salah satu tokoh penting yang dikenal dalam teori ini, karena pemikirannya sangat dihargai dalam filsafat dan turut diakui oleh Soepomo. Namun, pandangan Soepomo mengenai teori integralistik ini mendapat kritik dari sejumlah ahli di Indonesia karena dinilai kurang memberikan penjelasan yang relevan dengan filsuf-filsuf yang disebut maupun keterkaitannya dengan konsep negara integralistik secara rinci.

Selanjutnya, tujuan pemidanaan memiliki peran sebagai instrumen yang mendukung tercapainya fungsi hukum pidana secara umum, yaitu perlindungan terhadap masyarakat (*social defence*) dan pencapaian kesejahteraan sosial (*social welfare*). Dengan demikian, kebijakan pemidanaan tidak hanya berfokus pada aspek represif terhadap pelaku tindak pidana, melainkan juga diarahkan pada penciptaan ketertiban sosial dan pemulihan terhadap kondisi Masyarakat (Irmawanti & Arief, 2021, hlm. 222).

Dalam ranah filsafat pidana, fokus kajian tidak semata-mata tertuju pada aspek teknis penjatuhan pidana, melainkan pada fondasi normatif dan moral yang melatarbelakanginya. Hakikat pidana dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana oleh negara sebagai representasi kehendak publik, yang memiliki otoritas untuk menjatuhkan sanksi.

Jika teori pidana lebih menitikberatkan pada aspek fungsional hukum pidana, yakni bagaimana norma pidana bekerja dan diterapkan, maka filsafat pidana menyelami pertanyaan mendasar mengenai mengapa pidana dijatuhkan dan apa landasan nilai yang membenarkannya. Tujuan pidana senantiasa dipengaruhi oleh legitimasi moral dari dasar-dasar pengancaman dan penjatuhan pidana itu sendiri. Secara historis dan normatif, pidana berkembang dari paradigma pembalasan (retributif), menuju pendekatan utilitarian (preventif dan represif demi kemanfaatan sosial), serta model integratif yang memadukan nilai-nilai pembalasan dan kemanfaatan secara proporsional (Bahagiati, 2020, hlm. 119).

E. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Pancasila dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan. Konsep pidana yang menekankan pembalasan dan efek jera dalam sistem kepenjaraan adalah warisan kolonial yang kini dianggap tidak lagi sejalan dengan semangat dan

identitas bangsa Indonesia. Pada 5 Juli 1963, istilah "Pemasyarakatan" diperkenalkan pertama kali oleh Sahardjo dalam pidato berjudul "Pohon Beringin Pengayoman".

Di bawah filosofi Pohon Beringin Pengayoman, tujuan hukum pidana adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan ini tidak hanya diberikan kepada masyarakat umum dari kejahatan, tetapi juga kepada pelaku kejahatan melalui pembinaan, pembekalan keterampilan hidup, bimbingan menuju pertobatan, dan pendidikan agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna. Secara ringkas, tujuan pemidanaan penjara adalah Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan sebagai sebuah Sistem ditegaskan sebagai pengganti Sistem Kepenjaraan pada 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kepenjaraan di Lembang, Bandung. Dalam konferensi tersebut, Pemasyarakatan dinyatakan sebagai sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum yang merepresentasikan keadilan dengan tujuan untuk mencapai reintegrasi sosial, yakni memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peralihan menuju Sistem Pemasyarakatan dikuatkan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang memperkuat pelaksanaan sistem ini. Seiring perkembangan zaman, tuntutan terhadap pelaksanaan Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana menuntut adanya penyesuaian terhadap dinamika sosial melalui perubahan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan hadir untuk memperluas peran dan tanggung jawab dalam memperlakukan tersangka, terdakwa, dan terpidana, mulai dari proses peradilan hingga pelaksanaan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sistem Pemasyarakatan menjamin perlindungan hak-hak tahanan dan anak, serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Dengan demikian, mereka dapat kembali diterima oleh masyarakat, hidup secara wajar sebagai warga negara yang berkualitas, taat hukum, bertanggung jawab, dan berperan aktif dalam pembangunan, sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat dari risiko kejahatan berulang (Lapas Kelas IIB Sleman, 2023, para. 2–4).

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan diperlukan partisipasi masyarakat, baik melalui kerja sama dalam proses pembinaan maupun melalui sikap terbuka untuk menerima kembali narapidana yang telah menyelesaikan masa hukumannya. Dalam sistem pemasyarakatan, pembinaan merupakan suatu proses yang tersusun secara sistematis, di mana setiap komponen yang terlibat saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang sama. Komponen-komponen tersebut mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam pembinaan, yaitu narapidana, petugas Lapas, dan masyarakat yang kelak akan menerima kembali narapidana setelah bebas.

Perlakuan terhadap narapidana dengan sistem yang berfokus pada pembinaan yang terarah dan bertujuan untuk memulihkan hubungan

narapidana dengan masyarakat sudah ada sebelum Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disahkan. Hal ini tercermin dalam Surat Edaran Dirjen Bina Tuna Warga No. K.P.13/3/1 tertanggal 8 Februari 1965, yang menjelaskan metode pembinaan dalam empat tahap yang membentuk suatu proses pembinaan terpadu. Tahapan tersebut secara umum meliputi tahap orientasi/pengenalan, tahap asimilasi dalam arti sempit, tahap asimilasi dalam arti luas, dan tahap integrasi dengan masyarakat. Konsep pembinaan yang terpadu dan terencana dalam bentuk tahapan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menjalankan tujuan pemidanaan secara lebih optimal melalui suatu sistem (Saputra, 2020, hlm. 9).